

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada tahun 2015 – 2020, Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran kuadran III dan IV. Kuadran III merupakan klasifikasi untuk APBD kecil dan tumbuh, sedangkan kuadran IV merupakan klasifikasi untuk APBD kecil dan stagnan. Hal ini dapat diartikan bahwa Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh kabupaten/kota yang memiliki APBD yang kecil. APBD kecil merupakan kabupaten/kota memiliki rasio APBD per kapita di bawah rata-rata dengan tingkat pertumbuhan APBD di atas rata-rata wilayah untuk APBD tumbuh atau di bawah rata-rata wilayah untuk APBD stagnan. Dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Tengah belum memaksimalkan daerah-daerahnya untuk meningkatkan APBD yang dimiliki. Hal ini juga berpotensi meningkatkan tingkat ketergantungan fiskal kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat karena pemerintah daerah belum dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. Pemerintah daerah dapat berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui dengan memaksimalkan potensi-potensi dan sumberdaya yang dimiliki atau dengan sumber-sumber dana lainnya seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan agar nilai APBD juga meningkat. Selain itu, dari tingkat ketergantungan fiskal, Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh kabupaten/kota yang masih memiliki pola hubungan instruktif. Hal ini dapat diartikan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat kemandirian daerah yang sangat tidak mandiri dan dianggap belum mampu melaksanakan otonomi daerah, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, Provinsi Jawa Tengah masih didominasi dengan kabupaten/kota yang memiliki APBD kecil dengan tingkat pertumbuhan APBD yang stagnan atau bertumbuh. Selain itu, Provinsi Jawa Tengah juga didominasi oleh kabupaten/kota yang memiliki ketergantungan fiskal yang termasuk pola hubungan instruktif. Pola hubungan instruktif adalah pola yang menggambarkan peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah, dimana tingkat kemandirian daerah sangat tidak mandiri dan dianggap belum mampu melaksanakan otonomi daerah. Oleh karena itu terdapat beberapa rekomendasi yang bisa diberikan kepada kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kinerja meningkatkan kinerja APBD dan mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

1. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat meningkatkan nilai PAD pada APBD dengan memaksimalkan sumber pendapatan yang sudah ada, meningkatkan efektivitas pemungutan pendapatan daerah lainnya seperti pajak daerah dan retribusi, mengembangkan sumber pendapatan pada sektor lain, mengembangkan potensi-potensi dan sumberdaya daerah untuk menjadi sumber pendapatan baru.
2. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah juga dapat melakukan permintaan kewenangan di bidang fiskal yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan yang masih menjadi milik pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
3. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perekonomian daerah, dan memperluas lapangan kerja agar produktivitas masyarakat terus meningkat.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian terhadap kinerja APBD dan tingkat ketergantungan fiskal dengan memperluas wilayah kajian
5. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah periode tahun penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan dapat melihat perkembangan dari satu periode ke periode lainnya
6. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah rasio-rasio analisis fiskal yang lain seperti pengukuran kinerja PAD, kinerja pembangunan, kebutuhan fiskal, dan lain-lain.